

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2015-2019

Siti Fatimah Nurhayati¹✉, Alma Frida Henrryawati²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

✉ sfn197@ums.ac.id

Analisis Faktor—Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2015-2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah sektor pendidikan, belanja daerah sektor kesehatan, kemiskinan dan produk domestik regional bruto di provinsi Banten tahun 2015-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Model analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil uji pemilihan model terpilih random effect model (REM) sebagai model terbaik. Semenantara analisis uji t menunjukkan variabel belanja daerah sektor pendidikan dan kemiskinan berpengaruh negative, variabel belanja daerah sektor kesehatan berpengaruh positif dan variabel produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil uji F membuktikan bahwa pendekatan random effect model eksis. Adapun besarnya koefisien determinan senilai 42,94%.

Kata kunci: Indeks pembangunan manusia, data sekunder, data panel.

1. Pendahuluan

Pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang mencakup reorganisasi dan reorientasi pada struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan seluruh sistem ekonomi yang ada. Pembangunan merupakan serangkaian upaya untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara. Pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai *alternative* yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik [6].

Menurut Todaro *and* Smith (2011) tujuan dari pembangunan ialah meningkatkan standar hidup yang tidak hanya melihat dari pendapatan namun juga kesempatan kerja yang ada, pendidikan yang baik, serta mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia.

Keberadaan sumber daya manusia dipandang sebagai suatu hal yang penting, yang tidak hanya terkait pada dimensi kesejahteraan namun juga terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses terhadap pendidikan yang berkualitas, dan pelayanan kesehatan. Indikator kualitas sumber daya manusia disebut dengan indeks pembangunan manusia atau IPM [31].

Indeks pembangunan manusia merupakan suatu indikator yang diterbitkan oleh *united nations development programme* (UNDP) yang berlandaskan pada tiga dimensi dasar yaitu: kesehatan yang dapat diukur dengan (*life expectancy at birth*) angka harapan hidup pada waktu lahir, pengetahuan yang diukur dengan angka melek huruf (*iteracy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), serta standar hidup layak (*purchasing power parity*) yang diukur dengan kemampuan daya beli [20].

Menurut UNDP (2020) pembangunan manusia di Indonesia cenderung mengalami kemajuan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 IPM Indonesia mencapai 71,92 angka ini meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018. Hal ini diakibatkan karena kualitas kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia mengalami peningkatan. Pencapaian ini juga menjadikan Indonesia menempati peringkat 107 dari 189 negara.

BPS mencatat bahwa selama periode 2018-2019 IPM Indonesia mengalami kemajuan karena adanya peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, angka harapan hidup, pengetahuan, dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Hal ini juga tidak lepas dari perkembangan IPM di setiap provinsi. Khususnya provinsi yang berada di pulau Jawa yang wilayahnya mendominasi aktivitas pembangunan dan perekonomian di Indonesia serta dengan jumlah tenaga kerja yang besar menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan IPM. Sebagian besar IPM di provinsi pulau Jawa sudah masuk dalam status sedang, karena memiliki nilai antara 60 persen – 70 persen, dan 70-80 berstatus tinggi. IPM di wilayah pulau Jawa dari tahun tahun 2015-2019 bisa dilihat pada tabel 1-1.

Tabel 1-1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pada 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2019

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
DKI. Jakarta	78,99	79,6	80,06	80,47	80,76
Jawa Barat	69,5	70,05	70,69	71,3	72,03
Jawa Tengah	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73
DI Yogyakarta	77,59	78,38	78,89	79,53	79,99
Jawa Timur	68,95	69,74	70,27	70,77	71,5
Banten	70,27	70,96	71,42	71,95	72,44

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2020

Berdasarkan tabel 1-1, IPM di setiap provinsi di pulau Jawa mengalami peningkatan. Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat pertama dari 6 provinsi. Hal ini dikarena DKI Jakarta merupakan pusat kegiatan pembangunan dan aktifitas perekonomian, lalu diikuti oleh provinsi DIY yang menempati urutan ke 2 dan disusul oleh provinsi Banten serta 3 provinsi lain. Peningkatan IPM provinsi Banten dipengaruhi oleh posisi Banten yang berada pada wilayah yang strategis, yaitu di ujung pulau Jawa. Provinsi Banten memiliki posisi strategis dari segi jalur perdagangan dan wilayah pendukung ibu kota. Provinsi Banten juga menjadi penghubung utama jalur perdagangan Sumatera-Jawa, yang menjadi lokasi aglomerasi perekonomian dan dekat dengan ibu kota DKI Jakarta.

Menurut Astri, dkk (2013) belanja daerah sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua dari beberapa faktor yang mempengaruhi IPM. Peran pendidikan dan kesehatan dalam IPM bisa terwujud dengan dialokasikannya belanja daerah per fungsi di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan alokasi tersebut kegiatan di sektor pendidikan

dan kesehatan dapat meningkat sehingga mendorong produktivitas masyarakat dalam mencapai indeks pembangunan manusia yang berkualitas.

Menurut BPS (2014), kemiskinan menyebabkan masalah yang kompleks pada kemampuan daya beli. Masyarakat mengalami keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam menjangkau standar kehidupan, sehingga mempengaruhi akses dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kehidupan yang layak pada kesehatan. Hal tersebut dapat menyebabkan hambatan pencapaian IPM.

Produk domestik regional bruto (PDRB) dapat mempengaruhi kemampuan pendapatan masyarakatnya dalam pemenuhan kebutuhan. Ketika PDRB meningkat maka secara bersamaan akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan daya beli yang dapat mendorong peningkatan IPM [33].

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai bagaimana pengaruh belanja daerah disektor pendidikan dan kesehatan, jumlah penduduk miskin, serta produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Banten dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh belanja daerah sektor pendidikan dan sektor kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pengaruh produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Banten tahun 2015-2019.

2. Literatur Review

Modal manusia memiliki peran penting dalam pencapaian produktivitas yang tinggi dan pembangunan yang berkelanjutan dalam kegiatan perekonomian. Kunci utama dari modal manusia adalah pendidikan yang didukung oleh bidang kesehatan, dan faktor lainnya, sehingga modal manusia akan menjadi investasi jangka panjang yang penting untuk kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat di masa depan [7].

Menurut Todaro *and* Smith (2011:445) pendidikan dan kesehatan dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebagai input fungsi produksi agregat. Oleh karena itu, investasi pada modal manusia dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang penting. Kesehatan adalah dasar kapasitas dalam meningkatkan pendidikan. Melalui pendidikan akan terlahir modal manusia yang berkualitas. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan meningkatkan jumlah produktivitasnya. Dengan demikian, kesehatan tenaga kerja harus dijaga karena merupakan input dari produktivitas.

2.1. Indikator Kualitas Sumberdaya Manusia

Menurut Todaro *and* Smith (2011:57) salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia. IPM Menurut *United Nations Development Programme* (2015) indeks pembangunan manusia adalah indeks yang berfokus pada tiga dimensi dasar pembangunan manusia seperti umur panjang dan sehat yang diukur dengan harapan hidup saat lahir, kemampuan untuk memperoleh pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah dan tahun sekolah yang diharapkan, dan kemampuan untuk mencapai taraf hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita.

Menurut BPS (2016) terdapat empat komponen dalam indeks pembangunan manusia yaitu:

1. Angka harapan lama sekolah
Angka harapan lama sekolah menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.
2. Rata-rata lama sekolah
Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani..
3. Angka harapan hidup
Angka harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu sejak lahir.
4. Pengeluaran per kapita
Pengeluaran rata-rata perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri di bagi dengan banyaknya anggota dalam rumah tangga yang telah disesuaikan.

2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia antara lain:

1. Belanja daerah sektor pendidikan

Berdasarkan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa belanja daerah dipergunakan untuk pembangunan, peningkatan perekonomian dan pembangunan manusia yang memiliki dampak yang positif bagi masyarakat. Belanja daerah digunakan untuk melayani masyarakat, baik berupa penyediaan maupun pemeliharaan fasilitas publik, layanan jasa publik, pelayanan administrasi dan jaminan sosial dengan mempertimbangkan standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pemerintah berkewajiban menyediakan layanan dasar untuk mendorong kualitas masyarakatnya, seperti layanan di bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan investasi yang berdampak pada waktu yang akan datang. Pendidikan menjadi modal dasar dalam pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan bangsa. Pemerintah harus menyediakan alokasi belanja pada sektor pendidikan yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan serta melakukan investasi dalam membentuk modal manusia (*human capital*). Besarnya belanja di sektor pendidikan akan menentukan seberapa pencapaian dari hasil pembangunan manusia [19].

2. Belanja daerah sektor kesehatan

Belanja pada sektor kesehatan diatur dalam undang-undanga No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Belanja pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Menurut Jhingan (1999:389) pengeluaran di bidang kesehatan masyarakat dan fasilitas medis membantu pembentukan modal manusia. Pemerintahan membangun sarana dan prasarana yang dapat memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan di bidang kesehatan. Dengan mengoptimalkan pengeluaran belanja daerah di sektor kesehatan, rakyat menjadi lebih sehat. Ketika rakyat sehat, produktivitasnya akan semakin meningkat. Oleh karena itu, pengeluaran belanja

kesehatan yang semakin besar membantu dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga mendorong tingkat pembangunan manusia ke arah yang lebih baik.

3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, sehingga berakibat pada peningkatan jumlah pengangguran dan rendahnya sumber daya manusia [16].

Kemiskinan dapat menjadi efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia, ketika masyarakat mengalami kemiskinan maka kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun, sehingga mempengaruhi kebutuhan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan yang akan terabaikan. Hal ini menjadi *gap* pembangunan manusia diantara keduanya menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM tidak terealisasikan dengan baik [18].

4. Produk domestik regional bruto

Produk domestik regional bruto tidak hanya menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi suatu daerah, namun juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam melihat kemakmuran suatu daerah melalui peranan sektor-sektor ekonomi yang menyumbang besar kecilnya angka PDRB. Ketika PDRB suatu daerah meningkat maka menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi, artinya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pola konsumsi, dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat akan semakin meningkat. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan indeks pembangunan manusia serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian [1].

2.3. Dampak Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pembangunan Ekonom

Indeks pembangunan manusia memiliki tujuan melihat kesejahteraan rakyat, karena manusia bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi diharapkan sebagai subjek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu wilayah atau kemajuan suatu negara. Tingkat indeks pembangunan manusia yang tinggi dapat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber perbangunan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pembangunan ekonomi [9]. Mutu penduduk yang baik, juga akan lebih mampu berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. pembangunan manusia yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat konsumsi setiap masyarakatnya yang akan ikut bertambah, sehingga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi disuatu daerah (Asnidar, 2018).

Indeks pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Semakin cepat pembangunan manusia dengan cara pemerataan pendidikan dan kesehatan maka akan semakin meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja, yang akan mendorong peningkatan pendapatan baik secara individu maupun nasional. (Nizar, 2013).

Indeks pembangunan manusia akan menjadi penghalang pada peningkatan pembangunan ekonomi, ketika IPM disuatu daerah berada pada kategori rendah. Rendahnya IPM dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang menurun dapat menyebabkan rendahnya perolehan pendapatan, sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin

yang meningkat akan menyebabkan penurunan mutu pendidikan dan kesehatan yang akan menyebabkan ketidak sejahteranya masyarakat di daerah tersebut (Agustian, 2007).

2.4. Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2020) pengembangan sumber daya manusia di Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan yang berkembang dipengaruhi oleh kesadaran penduduknya yang ikut serta dalam mendorong proses pembangunan nasional. Ada empat kebijakan pokok dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yaitu:

1. Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani dan rohani, serta kualitas kehidupan seperti perumahan dan permukiman yang memadai.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebaran.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan.
4. Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Kemenkeu (2020) melalui sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap pembangunan nasional, namun juga dalam mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan.

2.5. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Muliza, Zulham dan Sertarifa (2017)	Regresi Data Panel	belanja daerah pendidikan dan belanja daerah kesehatan tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada $\alpha=10\%$
2.	Murzan dan Effendi (2019)	Regresi Data Panel	pengeluaran sektor pendidikan dan pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada $\alpha=1\%$
3.	Regina Siring dan Arifin (2020)	Regresi Data Panel	kemiskinan dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada $\alpha=1\%$
4.	Yasinta (2018)	Regresi Data Panel	belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan kemiskinan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada $\alpha=1\%$
5.	Hadinata Valeriani dan Suhartono	Regresi Data Panel	PDRB dan belanja fungsi pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada $\alpha=5\%$
6.	Regina, Siring, dan Arifin (2020)	Regresi Data Panel	kemiskinan dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada $\alpha=1\%$ Sementara pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia

2.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap hasil penelitian yang masih harus diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah sektor pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Banten tahun 2015-2019.
2. Belanja daerah sektor kesehatan berpengaruh secara terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Banten tahun 2015-2019.
3. Jumlah penduduk miskin berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Banten tahun 2015-2019.
4. Produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Banten tahun 2015-2019.

3. Metode

3.1. Definisi Operasional Variabel

Guna untuk memperjelas pemahaman tentang variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka akan dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Indeks pembangunan manusia (IPM)
Indeks pembangunan manusia merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu (a) umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir, (b) pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, (c) standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan (BPS, 2019). Data yang digunakan dinyatakan dalam satuan persen/tahun.
2. Belanja daerah sektor pendidikan (BP)
Belanja daerah merupakan pengeluaran kas daerah, bagian dari belanja daerah bidang pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan. Pendidikan merupakan bagian penting dalam pencapaian kapabilitas manusia, yang juga bersifat esensial bagi kehidupan masyarakat (DJPK, 2015). Data yang digunakan dinyatakan dalam satuan rupiah/tahun.
3. Belanja daerah sektor kesehatan (BK)
Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis. Alokasi belanja kesehatan adalah besarnya pengeluaran pemerintah dari total anggaran dan belanja yang dialokasikan untuk sektor Kesehatan [26]. Data yang digunakan dinyatakan dalam satuan rupiah/tahun.
4. Kemiskinan (POV)
Kemiskinan dapat diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (BPS provinsi Banten, 2019). Data yang digunakan dinyatakan dalam satuan ribu jiwa/tahun.
5. Produk domestik regional bruto (PDRB)
Produk domestik regional bruto merupakan penjumlahan hasil dari nilai tambah (*value added*) dari seluruh sektor unit produksi dalam satu tahun. Unit produksi tersebut

menghasilkan barang dan jasa serta berada dalam semua sector [27]. Data yang digunakan dinyatakan dalam satuan miliar rupiah/tahun.

3.2. Metode Analisis Data

Guna megestimasi pengaruh belanja daerah sektor pendidikan, belanja daerah sektor kesehatan, kemiskinan, dan PDRB, digunakan analisis regresi data panel dengan model ekonometrika yang dapat dilihat sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log BP_{it} + \beta_2 \log BK_{it} + \beta_3 \log POV_{it} + \beta_4 \log PDRB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- IPM = Indeks pembangunan manusia (persen/tahun)
 BP = Belanja daerah sektor pendidikan (rupiah/tahun)
 BK = Belanja daerah sektor kesehatan (rupiah/tahun)
 POV = Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa/tahun)
 PDRB = Produk domestik regional bruto (miliar rupiah/tahun)
 β_0 = Konstanta
 β_i = Koefisien regresi variabel bebas ke-i
Log = Operator logaritma natural
 ε = Error term
i = Kabupaten atau Kota
t = Tahun

Berikut adalah langkah-langkah estimasi data panel [12]:

1. Metode estimasi data panel
 Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam estimasi parameter model regresi data panel yaitu: *Pooled least squares* (PLS) atau *Common effect model* (CEM), *Fixed effect model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM)
2. Pemilihan Estimator Terbaik
 Guna mengetahui estimator terbaik diantara ketiga model diatas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman.
3. Uji kebaikan model dan uji validitas pengaruh, terdiri dari:
 - a. Uji signifikansi simultan (Uji F)
 - b. Uji signifikansi parsial (Uji t)
 - c. Menghitung koefisien determinasi (R^2)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Analisis Model terbaik

Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman (table 4-1), model *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap model *Random Effect Model* (REM) tersaji pada tabel 4-2 dan tabel 4-3.

Tabel-1. Hasil Estimasi *Random Effect Model* (REM)

$(\widehat{IPM})_{it} = 66,47419 - 0,941339 \log BP_{it} + 1,647668 \log BK_{it} - 3,547528$
(0.0520)*** (0.0039)** (0.0836)**
$\log POV_{it} + 0,068928 \log PDRB_{it}$
(0.8160)***
$R^2 = 0,429696; DW-Stat = 0,863128; F = 6,404343; Prob. F = 0,000593$

Sumber: hasil olah data sekunder.

Keterangan:

*signifikan pada $\alpha = 0,01$

** signifikan pada $\alpha = 0,05$

*** signifikan pada $\alpha = 0,10$

Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t

Tabel-2. *Effect dan Konstanta Cross Section*

No	Wilayah	Effect	Konstanta
1	Kab. Pandeglang	-4,165215	2,335993
2	Kab. Lebak	-5,344238	1,156970
3	Kab. Tangerang	2,829853	9,331061
4	Kab. Serang	-5,154737	1,346471
5	Kota Tangerang	8,375758	14,876966
6	Kota Cilegon	-3,287002	3,214206
7	Kota Serang	0,142809	6,644017
8	Kota Tangerang Selatan	6,602772	13,103980

Sumber: hasil olah data sekunder.

4.2 Uji Kebaikan Model

Uji kebaikan model dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Uji Eksistensi Model Terestimasi REM (uji F)

Model eksis ketika setidaknya satu variabel independen memiliki pengaruh variabel dependen (tidak semua koefisien regresi bernilai nol). Berdasarkan tabel-1, terlihat nilai p (p -value) atau signifikansi empirik statistik F bernilai 0,000593 ($<0,01$); jadi H_0 ditolak. Simpulannya, model terestimasi *Random Effect Model (REM)* eksis.

2. Uji Validitas pengaruh Variabel Independen Model Terestimasi REM (uji t)

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen secara sendiri-sendiri. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel-3.

Tabel-3. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen

Variabel	t	Sig. t	Kriteria	Kesimpulan
<i>logBP</i>	-2,167732	0,0373	$<0,05$	Signifikan pada $\alpha = 0,05$
<i>logBK</i>	3,378696	0,0018	$<0,01$	Signifikan pada $\alpha = 0,01$
<i>logPOV</i>	-2,428467	0,0206	$<0,05$	Signifikan pada $\alpha = 0,05$
<i>logPDRB</i>	0,499763	0,6205	$>0,10$	Tidak Signifikan

Sumber: hasil olah data sekunder

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada tabel 4-4, terlihat tiga variabel independen yakni, variabel belanja daerah sektor pendidikan (*BP*), belanja daerah sektor kesehatan (*BK*), dan kemiskinan (*POV*) memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel produk domestik regional bruto (*PDRB*) tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (*IPM*).

3. Interpretasi Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan daya ramal model terestimasi. Berdasarkan tabel-1 terlihat nilai R^2 sebesar 0,429696, artinya 42,96% variasi variabel indeks pembangunan manusia dapat dijelaskan oleh variabel belanja daerah sektor pendidikan, belanja daerah sektor kesehatan, kemiskinan, dan PDRB. Sisanya 57,04%, dijelaskan oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

4.3 Pembahasan

Produk domestik regional bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Banten. Pembangunan manusia tidak semata-mata

karena faktor pendidikan dan kesehatan namun juga dilihat dari pengeluaran perkapita yang masih mengalami perbedaan disetiap kabupaten/kota di provinsi Banten. Perbedaan ini tidak lepas dari tingkat pendapatan masyarakat di provinsi Banten yang masih mengalami kesenjangan, seperti kota Cilegon yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten Lebak yang pendapatannya masih dibawah kabupaten/kota lainnya. Kesenjangan ini juga disebabkan oleh jenis usaha setiap kabupaten/kota di provinsi Banten memiliki sektor unggulnya masing-masing. Oleh karena itu tingkat pendapatan yang masih mengalami kesenjangan akan mempengaruhi tingkat PDRB, sehingga walaupun PDRB meningkat tetapi tidak dapat diikuti dengan peningkatan indeks pembangunan manusia.

Belanja daerah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan belanja daerah sektor pendidikan pada periode tahun pengamatan di provinsi Banten masih mengalami defisit anggaran, yang mengharuskan penutupan kekurangan anggaran dengan pendapatan dan anggaran lain. Selain itu kurangnya penyampaian materi yang tidak terserap dengan baik juga berdampak pada tingkat pengetahuan murid yang mengakibatkan penurunan skill dan ilmu yang didapat selama sekolah. Belanja daerah yang dialokasikan mempengaruhi perkembangan sektor pendidikan, karena tidak hanya berfokus pada pengeluaran untuk kegiatan murid, guru, dan keperluan sekolah, namun juga peningkatan fasilitas dan sarana pendidikan dalam menunjang kegiatan mengajar maupun belajar yang dapat mendorong meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolah sampai ketingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat, maka semakin mudah bagi masyarakat menerapkan dan mendapatkan hasil dari ilmu yang didapat untuk meningkatkan pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Hal ini dapat membantu peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi Banten dan sektor lainnya karena dengan pendidikan yang berkualitas dapat menjadi kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial

Belanja daerah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Banten. Pemerintah Banten memaksimalkan belanja daerah yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan penyediaan layanan kesehatan baik tenaga medis, rumah sakit dan puskesmas maupun fasilitas yang memberi kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan dasar dari produktivitas kerja dan kapasitas belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat akan memiliki semangat yang lebih dalam menjalankan aktivitas dan lebih produktif dalam bekerja. Kemudian anak yang sehat memiliki semangat dalam belajar yang dapat meningkatkan kemampuan, skill dan menjadi pribadi yang terdidik. Hal ini yang membantu dalam peningkatan pembangunan manusia di provinsi Banten.

Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Banten. Kemiskinan yang meningkat menciptakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat membiayai pendidikan dan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan gizi, asupan makanan yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Masyarakat yang mengalami kemiskinan pada umumnya memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendapatan, yang menyebabkan kebutuhannya tidak terpenuhi. Masyarakat yang masuk pada lingkaran kemiskinan akan mengalami kondisi dimana rendahnya pendidikan akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan skill, ketika pengetahuan dan skill yang dimiliki rendah dapat berdampak pada rendahnya pendapatan, yang kemudian menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar dan tingkat konsumsi yang berakibat pada

kesehatan masyarakat. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pembangunan manusia di provinsi Banten .

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis indeks pembangunan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi di provinsi Banten tahun 2015-2019 maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemilihan uji Chow dan uji Hasuman, terbukti bahwa model terbaik yaitu *random effect model (REM)*.
2. Hasil analisis Uji t pada REM menunjukkan bahwa variabel belanja daerah sektor pendidikan dan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada tingkat $\alpha = 0,05$, variabel belanja daerah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada tingkat $\alpha = 0,01$, sedangkan variabel produk domestik regional bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada tingkat $\alpha = 0,10$.
3. Hasil analisis uji F membuktikan bahwa model terpilih REM eksis pada tingkat α sebesar 0,01
4. Nilai *adjusted R-square* (R^2) sebesar 0,429696 berarti 42,96% variasi variabel indeks pembangunan manusia dapat dijelaskan oleh variabel belanja daerah sektor pendidikan, belanja daerah sektor kesehatan, kemiskinan, dan PDRB. Sisanya 57,04%, dijelaskan oleh variabel-variabel bebas atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepada Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) penelitian ini diharapkan dalam merencanakan program pembangunan lebih mengedepankan program-program yang bersifat *labour intensive* yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu atau penduduk miskin. Dengan cara ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta meningkatkan kesehatan mereka dengan memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi anak dan keluarga. Peningkatan pendapatan juga akan membantu dalam meningkatkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini lah yang diharapkan membantu dalam peningkatkan kualitas sumber daya manusia di provinsi Banten.
2. Kepada Pemerintah daerah provinsi Banten agar lebih bijaksana dalam menentukan besarnya anggaran pembangunan terutama di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga tepat sasaran dan tepat guna.
3. Bagi peneliti lain diharapkan pada penelitian yang akan datang dapat menambah variabel bebas lainnya atau menggunakan model analisis yang berbeda agar hasil penelitian yang diperoleh lebih sempurna.

Referensi

- [1] Alexander, Y. 2019. "Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Timur Periode 2010-2017". Ekonomi dan Bisnis. Ilmu Ekonomi. Universitas Brawijaya. Malang.
- [2] Arisman. 2018. Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries.

- Signifikan: *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 7, No.1, Hal.113–122.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/sjie.v7i1.6756>
- [3] Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi Lima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
 - [4] Astri, M., Nikensari, S. I., dan Kuncara W., H. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehata Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPED)*, Vol. 1, No.1, Hal 77. <https://doi.org/10.21009/jped.001.1.5>
 - [5] Asnidar. 2018. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol.2, No.1, Hal 1–12.
 - [6] Aziz, Muhammad., dan Hasan, Muhammad. 2018. *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Startegi Pembangunan Manusia dalam Prefektif Ekonomi Lokal (Edisi Kedua)*. Makasar: CV. Nur Lina Pustaka Taman Ilmu.
 - [7] Basri, F. dan Munandar, H. 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group
 - [8] Diastama, A. R., dan Purnomo, D. 2018. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2012 – 2016*. Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal.1–6.
 - [9] Djohanputro. 2006. Pengaruh Inflasi, Jumlah Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 2. No.2. Hal 1-18.
 - [10] Fadilah, A., Ananda, C. F., dan Kaluge, D. 2018. *A Panel Approach : How Does Government Expenditure Influence Human Development Index*. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol.10, No.2, Hal.130–139. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um002v10i22018p130>
 - [11] Fadillah, N., dan Setiartiti, L. 2021. Analysis of Factors Affecting Human Development Index in Special Regional of Yogyakarta. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, Vol.8, No.4, Hal.161–170. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20210422>
 - [12] Ghozali Imam dan Ratmono Dwi. 2017. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EVIEWS 10 Edisi Dua*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
 - [13] Gujarati D. N., dan Porter D. C. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R. C Buku 2 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
 - [14] Hadinata, E., Valeriani, D., dan Suhartono, S. 2020. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan belanja pemerintah fungsi pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *SOROT: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.15, No.1, Hal.43–53.
 - [15] Jhingan M. L. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan edisi 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo P.
 - [16] Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
 - [17] Kuncoro Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah Dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
 - [18] Mirza, D. S. 2011. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja

- Modal Terhadap Ipm Jawa Tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, Vol.4, No.2, Hal. 102–113. <https://doi.org/10.15294/jejak.v4i2.4645>
- [19] Mongan, J. J. S. 2019. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, Vol.4, No.2, Hal. 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- [20] Mulia, R. A., dan Saputra, N. 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *El-Riyasah*, Vol.11, No.1, Hal. 67–83.
- [21] Muliza, M., Zulham, T., dan Seftarita, C. 2017. Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Pdrb Terhadap Ipm Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.3, No.1, Hal.51–69. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6993>
- [22] Murzan, M., dan Effendi, M. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol.2, No.2, Hal. 433–448.
- [23] Pratama, M. Y., dan Purnomo, D. 2018. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusiadi 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016*. Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi Pembangunan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/68392>
- [24] Rahmat, D., dan Bachtiar, N. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Barat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol.53, No.9, Hal. 1689–1699.
- [25] Regina, Sinring, B., dan Arifin. 2020. *Analysis the Effects of Poverty , General Allocation Fund and Economic Growth To Human Development Index (Hdi) in Indonesia*. *Journal Economic Resources*, Vol.3, No.1, Hal. 1–12.
- [26] Sujudi, Ahmad. 2003. *Investasi Kesehatan untuk Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Departemen Kesehatan.
- [27] Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- [28] Todaro, M. P., dan Smith, S. C. 2011. *Ekonomi Pembangunan Edisi sebelas jilid 1*. Jakarta: Erlangga, PT Glora Aksara Pratama.
- [29] Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- [30] Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- [31] Yasinta, B. L. 2018. Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2017). *Jurnal Ilmiah*, Vol.3, No.4, Hal.270–283. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.77>
- [32] Yogiartoro, M., Komariah, D., dan Irawan, I. 2019. Effects Of Education Funding In Increasing Human Development Index. *Journal of Economics and Policy*, Vol.12, No.2, Hal. 482–497. <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i2.23391>
- [33] Zainuddin. 2015. Analisis Dampak Inflasi , Pdrb Dan Perkembangan Upah Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Masyarakat Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, Vol.1, No.1, Hal 45–52.
- [34] Badan Pusat Statistik. 2014. Kemiskinan dan Ketimpangan. <https://www.bps.go.id/>. Diakses tanggal 18 Maret 2021

- [35] Badan Pusat Statistik. 2016. Indeks Pembangunan Manusia 2017. <https://www.bps.go.id/publication/>. Diakses tanggal 20 April 2021
- [36] Badan Pusat Statistik. 2019. Indeks Pembangunan Manusia 2018. <https://www.bps.go.id/publication/>. Diakses tanggal 20 April 2021
- [37] Badan Pusat Statistik. 2020. Indeks Pembangunan Manusia 2019. <https://www.bps.go.id/publication/>. Diakses tanggal 3 Juni 2021
- [38] Badan Pusat Statistik. 2020. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2005-2020. <https://banten.bps.go.id/>. Diakses tanggal 18 Agustus 2021
- [39] Badan Pusat Statistik. 2021. Indeks Pembangunan Manusia 2020. <https://www.bps.go.id/publication/>. Diakses tanggal 18 Agustus 2021
- [40] DJPK. 2020. Belanja Daerah. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-belanja-daerah>. Diakses Tanggal 24 Agustus 2021.
- [41] Kemenkeu. 2020. Upaya pemerintah perbaiki kualitas SDM Indonesia. publikasi berita. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-upaya-pemerintah-perbaiki-kualitas-sdm-indonesia/>. Diakses tanggal 18 Agustus 2021.
- [42] Kemenko PMK. 2020. Membangun SDM Indonesia membangun sinergitas. publikasi pendidikan. <https://www.kemenkopmk.go.id/membangun-sdm-indonesia-membangun-sinergitas>. Diakses tanggal 18 Agustus 2020.
- [43] UNDP. 2020. *Human Development Report 2020: The Next Frontier Human Development and The Anthropocene*. New York. <http://hdr.undp.org/en/2020-report>
- [44] UNDP. 2015. *Human Development Report 2015: Work For Human Development*. New York <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2015>